**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**
2. **BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.**
3. Bahwa kegiatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan selama tahun 2014, baik yang didukung dengan anggaran APBD maupun yang didukung dengan anggaran APBN Tahun 2014 sampai dengan akhir bulan Desember 2014 sudah dilaksanakan dengan baik
4. Adanya perbedaan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik disebabkan adanya efisiensi dari perjalanan dinas serta pengeluaran lainnya, namun tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan
5. **BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**
6. Dari 18 kegiatan pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja selama tahun anggaran 2013, 12 kegiatan melalui dana APBD dan 6 kegiatan melalui dana APBN.
7. 6 (Enam) kegiatan pada dana APBN dapat berjalan sesuai dengan target, tidak mengalami permasalahan.
8. Suatu kegiatan melalui dana APBD yaitu kegiatan Identifikasi dalam rangka kerja sama dengan Negara IMT-GT dengan total dana Rp. 40.000.000,- dengan realisasi hanya Rp. 32.973.500,- (82,43%).
9. Secara umum ke 18 kegiatan dari 2 Program (PKTKP dan PKPTK) dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain capaian kinerja diatas 95%.
10. **BIDANG PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA.**

Semua kegiatan pada umunya telah dilaksanakan sesuai target yang direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada kendala-kendala namun dapat diatasi, kecuali kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan PNBP yang pelaksanaan baru dapat dilaksanakan Semester II tahun anggaran berjalan.

Dalam rangka optimalisasi peningakatan pelayanan dan pendataan penempatan tenaga kerja baik sektor formal maupun non formal perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas pelayanan baik dari pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. **BIDANG TRANSMIGRASI**
2. **Kesimpulan**
3. Terkait dengan upaya penyelesaian lahan bermasalah, tanpa adanya dukungan yang serius dari dinas yang menangani ketransmigrasian di Kabupaten, maka upaya yang dilakukan Dinas Ketransmigrasian Provinsi akan sia-sia.
4. Dalam tahun anggaran 2014, Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Ketrasmigrasian telah melaksanakan kegiatan memfasilitasi pembinaan trasmigrasi dana kegiatan pengembangan informasi manajemen transmigrasi meliputi :

* Kegiatan pengembangan informasi manajemen Transmigrasi telah tersedia antara lain : Laporan Bulanan Datin Bidang P4 Trans, Laporan Tahunan Datin Bidang P4 Trans, sesuai Permen 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketrasmigrasian, buku data Perancangan Permukiman transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahu 2014 dan laporan Bulanan Bidang Transmigrasi sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 18/MEN/XII/2011) tentang Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/ Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Laporan dan Buku Data Perancangan sangat di perlukan sebagai bahan dan acuan untuk penyelenggaraan transmigrasi kedepannya.
* Dalam pantauan Setditjen P2KTrans Kemenakertrans RI, Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi, tahun 2014 dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tergolong baik dan dapat dijadikan sebagai percontohan Satker Provinsi lain (surat terlampir)
* Melaksanakan Sosialisasi Ketransmigrasian di Kantor Bupati Lima Puluh Kota tanggal 21 Agustus 2014
* Melaksanakan rapat teknis pembinaan transmigrasi terhadap Pembina UPT Aek Nabirong, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Lintas Sektor terkait Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan di Hotel Daima Padang tanggal 6 s/d 8 Agustus 2014

1. **Saran**
2. Agar dinas yang menangani ketransmigrasian di Kabupaten/kota, baik dari sisi alokasi anggaran maupun upaya yang serius untuk menyelesaikan masalah
3. Dalam rangka peningkatan informasi masyarakat transmigran perlu dukungan dana yang meliputi antara lain, dana informasi, promosi dan kesejahteraan masyarakat transmigran
4. Untuk kebijakan investasi di daerah transmigrasi perlu peraturan daerah untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah transmigrasi
5. Perlu ditingkatkan kooredinasi antara pusat daerah asal, daerah penempatan (Provinsi), Kabupaten UPT serta instansi yang terkait dengan penyelenggaraan transmigrasi
6. **UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH**
7. Kesimpulan

Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran APBN Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produtivitas (PPKTKP) Tahun 2014 pada UPTD BPPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 218.289.800,- (97,27%) dan Fisik (100%).

Sedangkan kegiatan yang didukung dengan APBD DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 sudah dilaksanakan dengan baik realisasi Keuangan sebesar Rp. 412.804.670 (97,13%) dan fisik (100%).

Masyarakat yang ada pada Kabupaten/Kota masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pada UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk masa yang akan datang.

1. Saran

* Perlunya pelatihan secara berkesinambungan untuk semua daerah Kab/kota yang ada di Sumatera Barat
* Perlunya pengkaderan instruktur pada UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja dan Transamigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai SDM sesuai dengan bidangnya
* Perlunya penambhan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kegiatan pelatihan
* Perlunya peningkatan anggaran untulk kegiatan yang dianggarkan pada APBD guna menjangkau Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat
* Diharapkan adanya dasar pendukung untuk melakukan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan di Kab/Kota se Sumatera Barat
* Diharapkan untuk tahun depannya agar transport buat peserta yang dianggarkan oleh APBD bisa ditambah karena makin meningkatkannya biaya transport dan BBM.

1. **UPTD BLK PAYAKUMBUH**

**Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan yang bersumber dari dana APBD secara keseluruhan telah terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar Rp. 759.957.200,- (95,23%) dari jumlah dana yang tersedia sebesar Rp.798.060.040,-. Dan kegiatan pelatihan yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 511.686.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 508.876.300,- (99,45%) fisik 100 % dengan paket pelatihan sebanyak 12 paket.
2. Terbatasnya jumlah pegawai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan ketatausahaan seperti pegawai yang memiliki sertifikat bendahara, tidak tersedianya tenaga operator komputer dan belum adanya pegawai yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara.
3. Dalam rangka menjaga keamanan lingkungan kantor secara berangsur-angsur sesuai dengan jumlah dana yang tersedia.
4. **Saran**
5. Agar terwujudnya pelatihan yang berkualitas dimana lulusan pelatihannya mampu bersaing dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia serta mampu pula menciptakan lapangan kerja secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan kejuruannya masing-masing maka perlu diadakan program revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh, komponen-komponen pelatihan serta pengelolaannya harus secara profesional
6. Untuk mendukung pengelolaan kegiatan secara profesional diperlukan penambahan pegawai yang mempunyai sertifikat Bendahara atau sekurang-kurangnya pegawai yang mengerti dengan masalah keuangan, karena kalau tidak ada penambahan maka jabatan bendahara itu akan dijabat oleh Bendahara yang ada sekarang ini, jadi fungsi pengawasan sulit dilaksanakan.

1. **UPTD BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**
2. **Kesimpulan**
3. Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran APBD DPA SKPD Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium pada UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 984.677.762,- (98,00%) dan fisik (100%).
4. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja masih dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota, karena kegiatan ini sangat menguntungkan / bermanfaat bagi pihak perusahaan maupun perusahaan (supervisor, manager, teknis) serta tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Kabupaten/Kota.
5. Saran
6. Pelaksanaan akreditasi untuk laboratorium Balai Hiperkes dan KK Provinsi Sumatera Barat
7. Perlunya Sosialisasi K3 secara berkesinambungan sehinga seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota mengerti akan prinsip-prinsip K3
8. Perlunya penambahan SDM terutama tenaga teknis/analisis pengujian dan pemeriksaan serta dokter pada UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Sumatera Barat
9. Agar dilaksanakan renovasi Laboratorium Balai Hiperkes dan KK, karena labor tersebut termasuk pintu sudah banyak yang kropos
10. Alokasi dana untuk kegiatan yang bersumber dari dana dana APBD agar ditingkatkan
11. **SARAN**
12. **BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

Untuk optimalisasi kegiatan pada tahun berikutnya perlu peningkatan koordinasi dan singkronisasi antara Bidang dengan Perencanaan terutama terkait dengan harga satuan kegiatan.

1. **BIDANG PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA**
2. Agar untuk tahun berikutnya di harapkan usulan kegiatan baik yang tertampung pada anggaran APBD maupun APBN pada Bidang dapat di setujui, sehingga pelayanan prima dapat diberikan kepada semua yang berhubungan dengan Bidang Penempatan dan Pengembangan pada Dinas Tenga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Perlunya kendaraan dinas operasional untuk menunjang kegiatan yang ada di bidang.
4. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, terutama sekali dalam rangka pengurangan angka pengangguran, pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengalokasikan dana, baik APBN maupun APBD untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan angka pengangguran di Sumatera Barat.
5. Untuk terciptanya penempatan dan pengembangan kesempatan kerja diperlukan pembinaan secara terpadu bersama instansi terkait di Kabupaten/Kota.
6. **BIDANG TRASMIGRASI**
7. Untuk tahun anggaran berikutnya di sarankan agar pengalokasian dana untuk kegiatan Seksi Permukiman dan Penempatan sesuai kegiatan yang akan bisa direalisasikan.
8. Dalam rangka peningkatan Informasi masyarakat transmigran perlu dukungan dana yang meliputi antara lain, dan Informasi, Promosi dan kesejahteraan masyarakat transmigran.
9. Untuk kebijakan Investasi di Daerah Transmigran perlu di buatkan Peraturan Daerah untuk menarik Investor menanamkan modalnya di Daerah Trasmigrasi.
10. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Pusat, Daerah Asal, Daerah Penempatan (Provinsi), Kabupaten, UPT serta Instansi terkait dengan penyelenggaraan Transmigrasi.
11. **UPTD BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI**
12. Perlu di anggarkan untuk pengadaan komputer 2 (dua) unit masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha, petugas PSM serta laptop dan infocus untuk kegiatan pelatihan.
13. Agar dianggarkan untuk operasional Pejabat Fungsional PSM.
14. Perlu dianggarkan biaya rehabilitasi Gedung Kantor.
15. Perlu adanya kendaraan opersional roda 4 untuk pelaksanaan pelatihan di lokasi Permukiman Transmigrasi karena jarak menuju lokasi rata-rata 175 km dengan akses sangat sulit.
16. Perlu adanya kendaraan roda 2 untuk operasional administrasi kantor.
17. Pelatihan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan warga transmigran sesuai dengan kondisi UPT, tidak hanya mangacu pada program Pusat maupun Daerah.
18. **UPTD BLK PADANG PANJANG**

**Kesimpulan**

Sesuai dengan jadwal dan dana yang dialokasikan pada UPTD BLK Padang Panjang untuk tahun anggran 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan Renlakgiat, walaupun masih ada Kendal;a kecil yang timbul namun dapat segera diatasi.

**Saran**

Agar untuk tahun anggaran 2015 mendatang diharapkan adanya penambahan sarana peralatan dan penunjang lainya untuk kegiatan di UPTD BLK Padang Panjang.

1. **UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH**
2. Perlunya pelatihan secara berkesinambungan untuk semua daerah Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat.
3. Perlunya pengkaderan Instruktur pada UPTD BPPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai SDM sesuai dengan bidangnya.
4. Perlunya penambahan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kegiatan pelatihan.
5. Perlunya peningkatan anggaran untuk kegiatan yang dianggarkan pada APBD guna menjangkau Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat.
6. Di harapkan adanya dasar pendukung untuk melakukan evaluasi dari pelatihan yang telah di lakukan di Kab/kota se Sumatera Barat.
7. **UPTD BLK PAYAKUMBUH**
8. Agar terwujudnya pelatihan yag berkualitas dimana lulusan pelatihannya mampu bersaing dalam mengisi kesempatan kerja yag tersedia serta mampu pula menciptakan lapangan kerja secara mandiri atau kelompok sesuai dengan kujuruannya masing-masing maka perlu diadakan program revitalisasi dan refungsionalisasi secara menyeluruh, komponen-komponen pelatihan serta pengelolaannya harus secara profesional.
9. Untuk mendukung pengelolaan kegiatan secara profesional diperlukan penambahan pegawai yang mempunyai sertifikat Bendahara atau sekurang-kurangnya pegawai yang mengerti masalah keuangan, karena kalau tidak ada penambahan maka jabatan bendahara itu akan di jabat oleh Bendahara yang ada sekarang ini, jadi fungsi pengawasan sulit dilaksanakan.
10. Agar di sediakan / dianggarkan biaya untuk penyebaran Informasi palatihan kepada masyarakat.
11. Agar prioritaskan pengadaan Komputer Tahun 2014 Keperluan kegiatan pelatihan kejuruan Tata Niaga, karena Jurusan Komputer sangat banyak peminatnya.
12. **UPTD BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**
13. Perlunya penyuluhan hiperkes dan KK secara berkesinambungan sehingga seluruh perusahaan yang ada di Kab/Kota, mengerti akan Prinsip-Prinsip Hiperkes.
14. Perlu di beritahukan pada pimpinan perusahaan agar pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan karyawan di lakukan minimal (1 × setahun). Hal ini di perlukan untuk mengetahui kesehatan tenaga kerja sebagai perbandingan hasil pemeriksaan pada saat sekarang ini dengan tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku.
15. Perlunya penambahan SDM terutama tenaga teknis / analis pengujian dan pemeriksaan serta dokter pada UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Sumatera Barat.
16. Agar di adakan renovasi laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja, karena labor tersebut termasuk pintu dan sebagainya sudah banyak yang keropos dan hancur akibat gempa.
17. Alokasi dana untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN/Dekonsentrasi agar ditingkatkan.